

2022



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS**

**Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Tahun 2022**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
KATA PENGANTAR	7
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	8
1.3 Struktur Organisasi	9
1.4 Sumberdaya Manusia, Sarpras dan Anggaran	11
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	13
1.6 Landasan Hukum	21
1.7 Sistematika	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	23
2.2 Perencana Kinerja	26
2.3 Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	
3.1 Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2022	31
3.2 Analisis Capaian Kinerja	34
3.3 Realisasi Anggaran	59
3.4 Efisiensi Anggaran	63
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Rekomendasi	87
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2022	90
Prestasi dan Penghargaan	92
Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Tahun 2022	96

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	:	Permasalahan Bappeda pada tahun 2022.....	14
Tabel 2.1	:	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	25
Tabel 2.2	:	Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	26
Tabel 2.3	:	Sasaran strategis, IKU dan Target Kinerja Bappeda	28
Tabel 2.4	:	Perjanjian Kinerja Bappeda Kudus Tahun 2022.....	29
Tabel 3.1	:	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerinta.....	31
Tabel 3.2	:	Capaian Kinerja Bappeda Kudus Tahun 2022.....	32
Tabel 3.3	:	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja.....	33
Tabel 3.4	:	Alternatif Solusi pada Permasalahan Bappeda Kudus Tahun 2022.	52
Tabel 3.5	:	Akuntabilitas kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Bagan Susunan Organisasi	Halaman 10
---	---------------

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Kudus berisikan informasi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator kinerja mempunyai persentase capaian dengan kategori "Sangat Tinggi" berdasarkan skala pengukuran Kinerja Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017. Berdasarkan nilai tersebut didapatkan rata-rata persentase capaian kinerja Bappeda pada Tahun 2021 sebesar 101,09%. Adapun 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang pencapaiannya masuk dalam kriteria "Sangat Tinggi" meliputi:

1. Persentase capaian IKU Bupati (100%)
2. Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (102,47%)
3. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah (100 %)

Indikator kinerja Utama telah mencapai target yang ditetapkan. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan bimbinganNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus Tahun 2022. LKjIP Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2022. LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian kinerja dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Bappeda Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2022. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, serta menjadi bahan evaluasi agar kinerja lebih berorientasi hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Laporan ini juga sebagai bentuk komitmen Bappeda Kabupaten Kudus dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Kudus dan pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2022 ini. Kami sadari laporan ini masih terdapat kekurangan sehingga sangat diharapkan saran dan masukan dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan di masa mendatang.

Kudus, | Februari 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus



[Handwritten Signature]
Drs. REVUSIANTO SUBEKTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660321 198603 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Kudus juga melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2022 sesuai tugas dan fungsinya di bidang perencanaan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, Bappeda Kabupaten Kudus akan menyajikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, dengan disertai realisasi indikator kinerja dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penilaian dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah menjadi salah satu unsur penting untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, yang mendukung perbaikan pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Kudus memuat pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bappeda Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2022 yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang khususnya dalam perencanaan kinerja ditahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumberdaya dalam rentang waktu satu tahun

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappeda Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Bappeda Kabupaten Kudus mempunyai tugas pokok mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

b. Fungsi

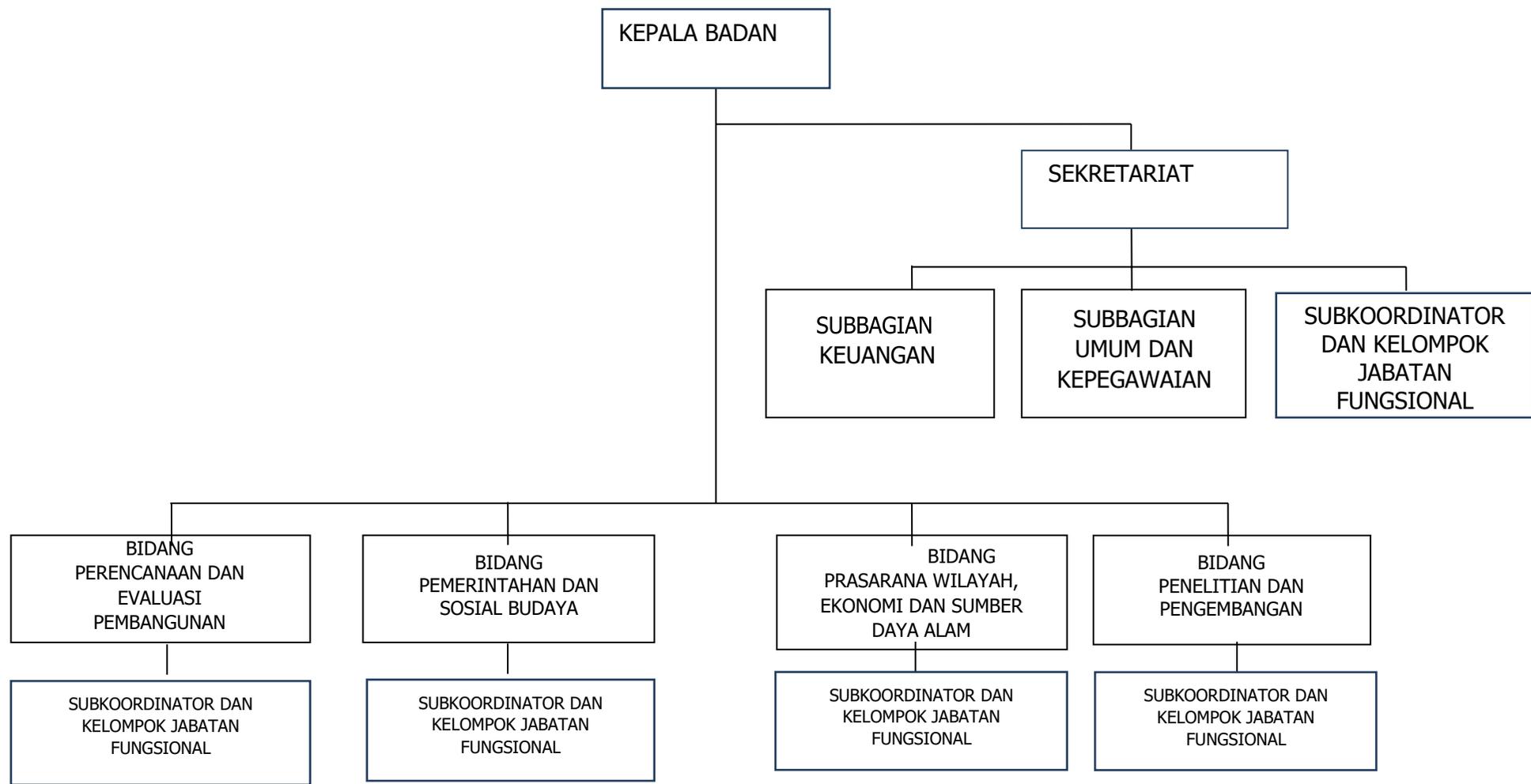
1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
2. Penetapan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
3. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
4. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
5. Pengendalian pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
6. Penyelenggaraan administrasi Badan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
7. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan; dan
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Selengkapnya Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus dapat terlihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus

1.4 Sumber Daya Manusia, Sarpras dan Anggaran

Sampai dengan akhir Desember 2022 sumber daya aparatur/pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Kabupaten Kudus berjumlah 46 orang terdiri dari PNS dan Non-PNS. Seluruh pegawai tersebut keseluruhannya aktif melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara struktur dan fungsi. Adapun perincian sesuai jabatan masing-masing sebagai berikut :

a. Kepala	:	1 orang
b. Sekretaris	:	1 orang
c. Kepala Bidang	:	4 orang
d. Kepala Subbagian	:	2 orang
e. Sub Koordinator	:	9 orang
f. Jabatan Fungsional Perencana	:	4 orang
g. Jabatan Fungsional Pranata Komputer	:	2 orang
h. Pelaksana	:	10 orang
i. Non PNS	:	9 orang
Jumlah	:	42 orang

Komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Kudus berdasarkan golongan sebagai berikut :

a. Pembina Utama Muda	:	1 orang
b. Pembina Tingkat I	:	1 orang
c. Pembina	:	11 orang
d. Penata Tingkat I	:	9 orang
e. Penata	:	3 orang
f. Penata Muda Tingkat I	:	1 orang
g. Penata Muda	:	3 orang
h. Pengatur Tingkat I	:	2 orang
i. Pengatur	:	2 orang
j. Non PNS	:	9 orang
Jumlah	:	42 orang

Sementara itu, apabila memperhatikan tingkat produktivitas kerja pegawai dengan klasifikasi tingkat usia pegawai Bappeda Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- Usia 51 – 60 tahun sebanyak 9 orang
- Usia 41 – 50 tahun sebanyak 18 orang
- Usia 31 – 40 tahun sebanyak 10 orang
- Usia 21 – 30 tahun sebanyak 5 orang

Berdasarkan jejang pendidikan yang telah diselesaikan oleh masing-masing pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Pasca Sarjana : 13 orang
- b. Sarjana : 23 orang
- c. Diploma 3 : 1 orang
- d. SLTA : 4 orang
- e. SLTP : 1 orang

Berdasarkan data inventaris, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Bappeda Kabupaten Kudus, sarana prasarana kantor yang tersedia sebagai berikut :

- a. Ruangan :
 - Ruang Kepala : 1 unit
 - Ruang Sekretariat : 1 unit
 - Ruang Bidang : 4 unit
 - Ruang Rapat Internal : 1 unit
 - Ruang Pertemuan : 1 unit
 - Ruang Arsip/ Gudang : 1 unit
- b. Kendaraan Dinas :
 - Roda 4 : 5 unit
 - Roda 2 : 24 unit
- c. Alat pendukung lainnya :
 - Komputer PC : 4 unit
 - Notebook : 52 unit
 - Ipad : 0 unit
 - Server Komputer : 2 unit
 - Printer : 36 unit
 - LCD Proyektor : 4 unit
 - Camera digital : 3 unit
 - Handycam : 4 unit
 - GPS : 2 unit

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Bappeda Kabupaten Kudus menjadi pelopor dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil melalui mekanisme perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, sesuai dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Sebagai perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan bidang perencanaan. Bappeda Kabupaten Kudus sesuai tugas pokok dan fungsinya berkewajiban mengawal proses perencanaan pembangunan daerah dan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam masa transisi disamping tetap menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan,

jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, termasuk dokumen perencanaan seluruh perangkat daerah. sebagai perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, Bappeda Kabupaten Kudus menjalankan fungsi dalam mewujudkan kegiatan utama penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah.

Permasalahan utama Bappeda Kudus pada tahun 2022, untuk urusan perencanaan yaitu masih pada ketersediaan data informasi yang belum optimal pada saat data tersebut dibutuhkan. Hal ini karena pengolahan data tergantung pada support instansi lain. Selain itu juga belum terlaksananya keseragaman data/satu data dari lintas sektor. Padahal keakuratan data merupakan factor krusial dalam pelaksanaan proses dan kualitas perencanaan. Permasalahan tersebut juga berlaku pada urusan Kelitbangan, yaitu keterbatasan data sektoral yang diampu perangkat daerah. Permasalahan lain terkait konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Bappeda adalah pada saat awal proses yaitu dalam bentuk penetapan pagu indikatif, sehingga perannya sangat terbatas. Proses penganggaran melibatkan banyak pihak seperti PD, DPRD, Stakeholder dan masyarakat. Ke depan diharapkan Bappeda dapat lebih berperan dalam sistem penganggaran sehingga akan lebih konsisten antara perencanaan dan penganggaran. Upaya yang telah dilaksanakan antara lain melalui perumusan kamus usulan, sehingga usulan lebih fokus, terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Permasalahan Bappeda pada tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	Perangkat Daerah	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERMASALAHAN
1.	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83,5	Indeks	88,47	Indeks	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya pedoman perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15	Dok	15	Dok	➤ Belum sesuai alur penyusunan dokumen perencanaan dengan ketentuan yang berlaku
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan keuangan PD	8	Dok	8	Dok	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya ASN dengan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi	38	Org	38	Org	➤ Belum terpenuhinya Diklat/Bimtek peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur	38	Dok	38	Dok		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	Perangkat Daerah	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERMASALAHAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Jenis	2	Jenis	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarpras kantor	46	Unit	46	Unit	
2.			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	Persen	100	Persen	
					Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100	Persen	100	Persen	
					Persentase keterisian data/informasi	60	Persen	60	Persen	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	Perangkat Daerah	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	4	Dok	4	Dok	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketidakhadiran kepala atau Pejabat OPD yang mengampu secara langsung menyebabkan koordinasi kurang optimal ➤ Perangkat daerah masih membutuhkan pendampingan dalam pencapaian kinerja ➤ Pengusulan kegiatan belum sepenuhnya memperhatikan target pembangunan daerah ➤ Kurangnya keterlibatan kepala OPD secara langsung menyebabkan usulan kurang optimal ➤ belum semua masyarakat mampu mengakses kegiatan musrenbang ➤ sosialisasi pemberian usulan dari masyarakat masih kurang ➤ Pengusulan kegiatan kecamatan dan desa belum sepenuhnya memperhatikan target dan prioritas pembangunan daerah ➤ Ketidaktepatwaktuan Kecamatan dalam menginput usulan ke sistem perencanaan ➤ belum semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat karena wilayahnya tidak tercantum dalam

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	Perangkat Daerah	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERMASALAHAN
										RKPD ➤ Perubahan kebijakan dan peraturan oleh Pemerintah Pusat ➤ Ketidaktepatwaktuan OPD dan pendamping komisi dalam menginput usulan ke sistem perencanaan ➤ Dengan kegiatan yang normatif dan berulang setiap tahun, masyarakat cenderung jenuh dan apatis karena usulannya tidak terealisasi
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	3	Dok	3	Dok	➤ belum terupdatenya data tepat waktu
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	2	Dok	2	Dok	➤ kurang sinkronnya antar data

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	Perangkat Daerah	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERMASALAHAN
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100	Persen	100	Persen	
					cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam					
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya	2	Dok	2	Dok	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan perekonomian dan SDA	3	Dok	3	Dok	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	Perangkat Daerah	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERMASALAHAN
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2	Dok	2	Dok	
3.	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	86	Persen	86	Persen	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	tersedianya pedoman tahapan penelitian dan pengkajian daerah	1	Dok	1	Dok	➤ Keterbatasan SDM pengampu penelitian
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	tersedianya pedoman tahapan pengembangan dan inovasi daerah	1	Dok	1	Dok	➤ Keterbatasan SDM pengampu pengembangan dan inovasi daerah

1.6 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
5. Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus.
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Kudus Tahun 2022
12. Keputusan Bupati Kudus Nomor 050/184/2022 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022

1.7 Sistematika

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus Tahun 2021 disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Penjabaran visi dan misi jangka menengah merupakan salah satu bagian penting dalam penyusunan dokumen LKjIP Perangkat Daerah. Bappeda Kabupaten Kudus sebagai salah satu perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati, mendukung dan memastikan tercapainya target indikator kinerja utama pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023. Berdasarkan visi dan misi Bupati Kudus, Bappeda menyusun perencanaan kerja jangka menengah (5 tahunan) yang dijabarkan dalam bentuk RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan perencanaan kerja tahunan dalam bentuk RKPd. Selanjutnya sebagai perangkat daerah, Bappeda Kabupaten Kudus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen rencana jangka menengah, serta Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini, yang menciptakan kesenjangan antar kondisi saat ini dengan masa depan yang ingin dicapai. Visi merupakan suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita tetapi dengan fokus masa depan. Pernyataan visi dapat memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

1) VISI

Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, Visi merupakan pandangan kedepan menyangkut kemana harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Bappeda Kabupaten Kudus ikut mendukung Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 adalah : **"KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA"**. Makna yang terkandung di dalam visi tersebut adalah agar Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya, yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera.

2) MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Ada empat Misi Kabupaten Kudus, dimana empat misi utama dikenal sebagai "Empat Pilar". Adapun Bappeda Kabupaten Kudus mendukung Bupati Kudus dalam mewujudkan Misi ke-2 yaitu: **"Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik"**. Dengan program prioritas menyangkut transparansi anggaran, akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik. Upaya peningkatan pelayanan publik dimaksudkan guna memberikan pelayanan publik yang bermutu untuk seluruh masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud termasuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi, energi,

perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dibutuhkan pemerintahan yang semakin handal. Keberhasilan mewujudkan pemerintah yang handal tergantung kepada sumber daya manusia yang tersedia. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan kinerja SDM. Peningkatan kinerja SDM dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan dengan harapan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. untuk melayani kepentingan masyarakat.

Langkah yang ditempuh untuk mencapai misi tersebut diantaranya melaksanakan Pendidikan dan pelatihan kepada aparatur sipil negara (ASN) secara berkesinambungan dan terarah, pelaksanaan pengawasan melekat dan fungsional secara efektif, peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi, perencanaan yang terarah, penyusunan sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan akuntabel dan pemberian pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan Bappeda secara keseluruhan. Penyusunan perencanaan lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi Bappeda Kabupaten Kudus.

a. Tujuan

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi perangkat daerah dan memiliki keterkaitan dengan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran –sasaran yang ingin dicapai. Tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Kudus diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Indikatornya adalah hal-hal yang dapat dijadikan petunjuk tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditentukan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau hasil jangka menengah. Sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Kudus berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
3. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah.

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran	Target Capaian					Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah		Persentase capaian IKU Bupati	87	91	95	100	100	100
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase Capaian IKU Bupati	87	91	95	100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	70,50	72,50	75	81	83	83
2.	Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan daerah		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	57	57	86	86	100	100
		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	57	57	86	86	100	100

2.2 Perencanaan Kinerja

Strategi dan kebijakan dalam Renstra perangkat daerah adalah strategi dan kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra perangkat daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan perangkat daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Berikut ini adalah Strategi dan Kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kudus 2018–2023:

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Perbaikan perencanaan berbasis kinerja	Penyusunan standar proses perencanaan yang akuntable
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pemberian ruang yang lebih luar pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan
			Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis spasial	Pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Peningkatan standard mutu pelayanan kepada OPD
2.	Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk

menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pencapaian tersebut menggunakan indikator-indikator kinerja yang digunakan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) dan kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Rencana program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Kudus yang tertuang dalam Renstra Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 merupakan serangkaian langkah penjabaran dari kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Bappeda. Rencana program dan kegiatan Bappeda ini juga merupakan bagian dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka untuk mewujudkan visi Kabupaten Kudus yaitu Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja Bappeda Kabupaten Kudus 2018-2023

URUSAN	:	Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.							
TUGAS POKOK	:	mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.							
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	SATUAN	TARGET					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase Capaian IKU Bupati	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi pengukuran: Jumlah IKU Bupati yang tercapai dibagi jumlah total IKU Bupati dikali 100% Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Bappeda 	Persen	87	91	95	100	100	
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi pengukuran: Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Bappeda 	Nilai	70,50	72,50	75	81	83	
3. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi pengukuran: Jumlah kegiatan utama penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dibagi Jumlah total kegiatan utama penelitian dan pengembangan dikali 100% Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Bappeda 	Persen	57	57	86	86	100	

2.3 Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud implementasi kinerja, perlu disusun perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen pimpinan unit kerja sebagai penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati merupakan hasil (*output*) atas kegiatan dan wujud kinerja (*outcome*) dari program pada tahun berjalan serta dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya secara berkesinambungan, dengan orientasi terhadap target capaian kinerja di periode akhir Renstra.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kepala Bappeda Kabupaten Kudus pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kudus untuk mewujudkan target kinerja melalui manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada hasil kinerja (terlampir). Bentuk perwujudan dari perjanjian kinerja tersebut, Bappeda Kabupaten Kudus telah melaksanakan 2 urusan, yaitu urusan perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan, terbagi menjadi 4 Program dengan 14 kegiatan dan 35 sub kegiatan yang didukung anggaran APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.992.625.000,- pada penetapan APBD 2022. Selanjutnya pada Perubahan APBD 2022, alokasi anggaran berubah menjadi menjadi Rp. 11.539.618.000,-. Selengkapnya Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Kudus sebagaimana Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase Capaian IKU Bupati	100%
2.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	86%

3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai
No	Program	Anggaran	
		Murni	Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.723.903.000	8.049.241.000
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.717.422.000	2.832.267.000
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	313.400.000	228.270.000
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	237.900.000	335.670.000
	JUMLAH	8.992.625.000	11.539.618.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

3.1 Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2022

Pengukuran kinerja dilakukan atas kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Rencana Kinerja Tahun 2022. Selanjutnya pada akhir tahun 2022 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasi kinerja dalam periode 1 tahun sehingga diketahui tingkat pencapaian kerjanya. Pencapaian kinerja tersebut dievaluasi dan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	≥ 90,1	Sangat Tinggi
2	75,1 - 90	Tinggi
3	65,1 - 75	Sedang
4	50,1 - 65	Rendah
5	0 s/d 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Pada Tahun 2022, Bappeda Kabupaten Kudus telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Kudus 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan, dan Renja Bappeda Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Sesuai Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2022, dan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kudus, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus diwujudkan yaitu sebagaimana

Tabel

3.2

berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori	Persentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase capaian IKU Bupati	100 %	104,55%	104,55%	Sangat Tinggi	105,39 %	100 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81	83	102,47 %	Sangat Tinggi	109,13 %	100%
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	86 %	86%	100 %	Sangat Tinggi	100 %	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2022, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator kinerja mempunyai persentase capaian dengan kategori "Sangat Tinggi" berdasarkan skala pengukuran Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017). Berdasarkan nilai tersebut didapatkan rata-rata persentase capaian kinerja Bappeda pada Tahun 2022 sebesar 102,34%.

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian									
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase capaian IKU Bupati	87,00%	73,91%	84,95%	91%	73,91	81,22%	95 %	100,12%	105,39%	100 %	104,55 %	104,55 %
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70,50	75,92	107,69%	72,5	77,19	106,47%	75	81,85	109,13%	81	83	102,47 %
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	57%	57%	100%	57%	57%	100%	86%	86%	100%	86	86	100%

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa indikator kinerja pertama mempunyai persentase capaian yang fluktuatif antara tahun 2019 s/d 2022. Pada tahun 2020, persentase capaian mengalami penurunan sebesar 3,73% dibandingkan tahun 2019 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 24,17%, serta mencapai 104,55% pada tahun 2022. Hal tersebut juga berlaku pada indikator kinerja yang kedua, dimana persentase capaian berfluktuatif antara tahun 2019 s/d 2022, walaupun realisasinya mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, persentase capaian mengalami penurunan sebesar 1,22% dan realisasi mengalami kenaikan sebesar 1,27 dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021, baik realisasi dan persentase capaian mengalami kenaikan sebesar 4,66 dan 2,66% dibandingkan tahun 2020. Sementara pada tahun 2022 realisasi mengalami kenaikan sebesar 1,15 sedangkan capaian mengalami penurunan sebesar 6,66%. Penurunan persentase pada indikator kinerja pertama dan dua, tahun 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia yang berimbas terhadap Kabupaten Kudus. Indikator ketiga, persentase capaian relatif stabil antara tahun 2019 s/d 2022 yaitu sebesar 100%. Secara keseluruhan rata-rata pencapaian indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 100%, termasuk terhadap capaian target akhir Renstra (Tahun 2023).

3.2 Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Pengukuran capaian kinerja terhadap Sasaran Strategis 1 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Persentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase capaian IKU Bupati	100 %	104,55%	104,55%	105,39%	104,55%

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa persentase capaian sasaran strategis 1 sebesar 100%, digolongkan kategori " Sangat Tinggi" berdasarkan skala pengukuran Kinerja (Permendagri 86 Tahun 2017). Persentase capaian pada tahun 2022 sebesar 104,55% mengalami penurunan sebesar 0,84% dibandingkan persentase capaian pada tahun 2021 sebesar 105,39%. Menurunnya persentase capaian pada sasaran strategis 1 disebabkan karena telah maksimalnya besaran target yang ditetapkan yakni 100% dibanding target tahun 2021 sebesar 95%. Sehingga meskipun secara capaian target mengalami penurunan akan tetapi secara capaian target keseluruhan sudah mengalami peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan sudah berjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang dan antar sub bidang serta support instansi pengampu IKU Bupati. Selain itu, percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja, dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta manajemen sumber daya juga mendorong capaian 100% terhadap indikator kinerja 1. Realisasi sasaran strategis 1 pada tahun 2022 (104,55%) sudah memenuhi target. Hal tersebut disebabkan unit kerja sudah mengambil tindakan dan langkah-langkah perbaikan agar terjadi peningkatan kinerja pada tahun tersebut, sehingga di tahun 2022 target kinerja di periode akhir Renstra dapat tercapai sesuai target.

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Persentase Capaian dari Target Tahunan
		2018	2019	2020	2021	2022	2022
1	2	3	4	5			
1	Indeks Pembangunan	74,25	74,80	75,35	75,89	76,44	99,28%

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Persentase Capaian dari Target Tahunan
		2018	2019	2020	2021	2022	2022
1	2	3	4	5			
	Manusia						
		74,58	74,94	75	75,16	75,89	
2	Harapan Lama Sekolah	13,58	13,97	14,2	14,44	14,67	90,32%
		13,21	13,22	13,23	13,24	13,25	
3	Rata-rata lama sekolah	8,33	8,45	8,50	8,70	9,01	100,55%
		8,62	8,63	8,75	8,76	9,06	
4	Persentase Akses dan mutu pendidikan	86,84	87,07	87,31	87,54	87,77	103,03%
		86,84	87,59	90,63	87,00	90,43	
5	Angka Harapan Hidup	76,47	76,48	76,49	76,51	76,52	100,31%
		76,48	76,50	76,6	76,68	76,76	
6	Angka Kematian Ibu	65,97	65,97	59,27	59,27	52,78	110,95%
		65,97	86,74	101,57	150,95	88,24	
7	Angka Kematian Bayi	8,00	7,8	7,5	7,3	7,1	102,74%
		8,00	8,20	8,26	6,75	5,96	
8	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp/org/thn)	10.706,45	10.847,79	10.989,14	11.130,49	11.271,84	102,99%
		10.979	11.318	11.160	11.272	11.609	
9	Indeks Reformasi Birokrasi	67,05	69,17	74	79	85	
		67,05	59,35	67,26	67,52	Belum rilis	
10	Nilai akuntabilitas kinerja	68,19	70,5	72,5	75	81	102,47%
		68,19	66,36	68,93	68,93	83	
11	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
12	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,92	2,13	2,35	2,56	2,68	126,12%
		2,72	2,73	3,08	2,53	3,38	
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,5	82	83	83,5	105,76%

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Persentase Capaian dari Target Tahunan
		2018	2019	2020	2021	2022	2022
1	2	3	4	5			
		80	82,45	86,81	86,88	88,31	
14	Angka Kriminalitas	0,015	0,015	0,014	0,014	0,013	146,15%
		0,015	0,010	0,015	0,011	0,019	
15	Indeks rasa aman	0,51	0,52	0,53	0,53	0,53	100%
		0,51	0,54	0,55	0,55	0,53	
16	Indeks Toleransi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	91,7%	91,7%	100%	
17	Pertumbuhan Ekonomi	2,97	2,97	3	3,10	3,14	
	<i>rilis Feb 2022</i>	3,24	3,09	-3,11	-1,98	Belum rilis	
	Pertumbuhan Ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau	5,32	5,40	5,50	5,60	Belum rilis	
		5,47	5,66	-6,67	4,63	Belum rilis	
18	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	113,8	121,86	128,03	134	139,78	
	<i>rilis Feb 2022</i>	120,79	127,52	129,13	126,95	Belum rilis	
19	Angka Kemiskinan	6,98	6,7	6,45	6,21	6,1	121,47%
		6,98	6,68	7,31	7,60	7,41	
20	Angka pengangguran	3,33	3,3	3,25	3,15	3,05	105,24%
		3,33	3,86	5,53	3,77	3,21	
21	Nilai investasi (dalam triliun Rp)	7,34	7,59	7,74	8,34	8,79	115,93%
		7,34	5,87	3,26	11,97	10,19	
22	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	78,61	79,71	80,72	81,72	82,72	102,57%
		78,61	81,29	83,20	83,6	84,85	
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,70	62,92	64,13	65,34	66,56	82,45%
		60,70	63,75	64,20	62,76	54,88	

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Persentase Capaian dari Target Tahunan
		2018	2019	2020	2021	2022	2022
1	2	3	4	5			

Catatan : *) Kondisi sampai dengan pertengahan Februari 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 berjumlah 23 indikator. Capaian IKU Tahun 2022 sebanyak 16 indikator atau 69,56 persen telah tercapai, 2 indikator atau 8,70 persen akan tercapai, 2 indikator atau 8,69 persen perlu upaya keras, dan 3 atau 13,04 persen NA (*Not Available*) yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi, Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB karena masih menunggu rilis. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa persentase capaian IKU Bupati pada tahun 2022 sebesar 100 persen. Angka tersebut didapat dari perbandingan antara persentase realisasi total IKU Bupati pada tahun 2022 (100 persen) dengan angka target persentase capaian IKU pada tahun 2022 (100 persen) dikalikan seratus persen. Sementara itu, persentase realisasi IKU Bupati tahun 2022 sebesar 100,12 persen. Angka tersebut didapat dari perbandingan antara total persentase capaian IKU pada tahun 2022 (2.302,86 persen) dengan jumlah IKU Bupati (23 indikator) dikalikan seratus persen. Untuk perhitungan persentase capaian per indikator, dihitung dengan formula yaitu realisasi tahun 2022 dibagi dengan target tahun 2022 dikalikan seratus persen. Formula perhitungan tersebut digunakan dalam perhitungan 18 indikator, sementara 5 indikator lainnya yaitu Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kriminalitas, Angka Kemiskinan, dan Angka Pengangguran menggunakan formula perhitungan yang berbeda. Formula perhitungan tersebut yaitu $(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})) / \text{Target}$.

- Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pengukuran capaian kinerja terhadap Sasaran Strategis 2 adalah sebagaimana tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Persentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81	83	102,46%	109,13%	83

Capaian kinerja pada sasaran strategis 2 (dua) adalah pada indikator Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar 81 dapat terealisasi sebesar 83. Artinya capaian kinerja pada Sasaran Strategis Ke-2 adalah 102,46% (Sangat Tinggi). Capaian ini didukung dengan adanya perbaikan dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah yang didasarkan

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kudus 2018-2023 serta Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kudus 2018-2023. Disamping itu juga dengan adanya perbaikan dalam berbagai aspek sebagai tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Kudus terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2022.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah. Pengukuran capaian kinerja terhadap Sasaran Strategis 3 adalah sebagaimana tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Persentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	86 %	86 %	100 %	100 %	86 %

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 adalah pada Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar 86%, telah terealisasi sebesar 86%, dengan tingkat capaian sebesar 100% (Sangat Baik). Persentase capaian pada tahun 2022 sama dengan persentase capaian pada tahun 2021 sebesar 86%. Persentase capaian pada sasaran strategis 3 disebabkan adanya kesesuaian antara hasil penelitian dan pengembangan dengan program pembangunan daerah. Walaupun hal tersebut sesuai dengan yang direncanakan namun perlu perhatian khusus untuk memastikan agar target kinerja di periode selanjutnya dapat tercapai, sekaligus memastikan ketercapaian target kinerja di akhir periode Renstra.

Sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, urusan penunjang bidang penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk mendorong pengembangan inovasi daerah. Indikator kinerja urusan penunjang penelitian dan pengembangan, pada Tahun 2022 mencapai 86%, meliputi 6 (enam) kegiatan kelitbangan dari 7 (tujuh) kegiatan kelitbangan sudah dilaksanakan. Adapun kegiatan kelitbangan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan. Kegiatan kelitbangan berupa perekayasaan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada tahun 2022, dikarenakan belum ada inkubator, belum ada labinov, belum ada technopark, dan belum ada jabatan fungsional perekayasa. Akan tetapi di tahun 2022 sudah ada upaya rintisan pemenuhan sarana prasarana pendukung tersebut melalui rencana pemindahtanganan asset Rintisan Gedung Techno Park yang masih dalam status kepemilikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus menjadi asset milik Bappeda Kabupaten Kudus. Meskipun kondisi saat ini penyusunan kebijakan daerah yang berdasarkan hasil penelitian masih belum optimal, dan belum didasarkan pada

permasalahan dan isu-isu yang ada di daerah, harapannya untuk selanjutnya dengan adanya sarana prasarana pendukung bisa lebih optimal. Permasalahan berkaitan dengan pengembangan adalah pemanfaatan inovasi yang masih belum optimal. Inovasi dalam hal ini merujuk kepada inovasi di masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan peningkatan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada Tahun 2022, inovasi yang dilakukan oleh Masyarakat dan Pelajar melalui lomba KRENOVA (Kreativitas dan Inovasi) Tahun 2022 berjumlah masing-masing 24 inovasi dari Kategori Umum dan 112 inovasi dari Kategori Pelajar / Mahasiswa. Untuk mendukung pengembangan penelitian dan inovasi daerah di Kabupaten Kudus, maka perlu penguatan pengembangan jejaring penelitian daerah, untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin (pasal 15 ayat 2 Permendagri Nomor 17 Tahun 2016). Adapun Urusan Penelitian dan Pengembangan di Bappeda disajikan pada tabel berikut:

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Hasil Penelitian dan Pengembangan		Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Faktor Pendorong Keberhasilan	Faktor Penghambat
	Jenis	Jumlah			
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					
	Kajian Pendataan Penyandang Disabilitas	1 (satu) dokumen	Dimanfaatkan untuk Dinas Sosial P3AP2KB.	Pelaksanaan penelitian bekerjasama dengan pihak ketiga / Perguruan Tinggi.	Belum ada JFT Peneliti di Bidang Litbang Bappeda
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan.	Kajian Penataan Toko Modern	1 (satu) dokumen	Dimanfaatkan untuk Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian UMKM.	Pelaksanaan penelitian bekerjasama dengan pihak ketiga / konsultan.	Belum ada JFT Peneliti di Bidang Litbang Bappeda
	Dokumen Laporan IDSD Tahun 2022.	1 (satu) dokumen	Pemanfaatan untuk peningkatan daya saing Kabupaten Kudus.	Rapat Koordinasi dengan OPD, Instansi vertical terkait dan pelibatan Perguruan Tinggi dalam penyusunan data IDSD.	Belum ada Satu Data

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Hasil Penelitian dan Pengembangan		Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Faktor Pendorong Keberhasilan	Faktor Penghambat
	Jenis	Jumlah			
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi					
Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen Laporan Inovasi Daerah.	1 dokumen	Bahan evaluasi inovasi yang telah dihasilkan OPD, untuk disempurnakan nilai kematangan inovasinya.	Koordinasi aktif dengan BPP Kemendagri dan Bidang Inotek Bappeda Provinsi Jawa Tengah.	Belum ada JFT Perekayasa dan JFT Pengolah Data & Teknologi di Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Kudus.
	Lomba Krenova tingkat Kabupaten	2 kategori (Umum & Pelajar)	Hasil inovasi dituangkan dalam Majalah Krenova dan disebarluaskan ke stakeholder dan perusahaan swasta terkait.	Keterlibatan aktif SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta, serta Perguruan Tinggi dan Desa untuk mengikuti Lomba Krenova.	Kewenangan SMA/SMK/MA tidak lagi di Kabupaten, tetapi kewenangan Provinsi.
	Fasilitasi IPKD Tahun 2018-2020	3 tahun	Evaluasi pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal nilainya untuk ditingkatkan.	Kolaborasi Bappeda, BPPKAD, Dinas Kominfo dan Inspektorat dalam pengumpulan dan penginputan data IPKD.	Aplikasi IPKD Kemendagri masih baru, sehingga belum maksimal dalam penginputannya .

Pencapaian kinerja dari ketiga sasaran strategis tersebut di atas, tidak terlepas dari pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1.1

Sasaran Program	Indikator	Target
tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%
	Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%
	Persentase keterisian data/informasi	60%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target
1.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Pembangunan Daerah		
		Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%
		Persentase keterisian data dan informasi	60%
1.1.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dok
	Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen Renja OPD	2 dok
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	1 kali
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan musrenbang kabupaten	1 kali
	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	jumlah dokumen bahan musrenbang kecamatan	1 dok
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten	2 dok
1.2.	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	3 dok
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3 dok
1.3.	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	2 dok
	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	jumlah dokumen evaluasi pembangunan	2 dok

2. Sasaran Program 1.2

Sasaran Program	Indikator	Target
➤ Tersedianya pedoman perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya	➤ Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	➤ 100%
➤ Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	➤ cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	➤ 100%

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target
2.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%
		Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100%
2.1.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya	2 dok
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	1 dok
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud	1 dok
2.2.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan perekonomian dan SDA	3 dok
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1 dok

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	2 dok
2.3.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2 dok
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2 dok

3. Sasaran Program 2.1

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83 indeks

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83,5 indeks
3.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya pedoman perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 dok
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	9 dok
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	6 dok
3.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan keuangan PD	8 dok

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD	7 Orang
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	8 dok
3.3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya ASN dengan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi	35 orang
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	5 orang
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	35 orang
3.4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur	38 dok
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	45 jenis
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	8 jenis
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor	10 jenis
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan	5 jenis
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 judul
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi	30 kali
3.5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	tersedianya pedoman pengelolaan sumber	15 dok

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target
	Pemerintahan Daerah	daya aparatur	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah PHD dan tenaga administrasi	8 orang
3.6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur	30 unit
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	30 unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang dipelihara	10 unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 unit

4. Sasaran Program 3.1

Sasaran Program	Indikator	Target
Tersedianya pedoman tahapan penelitian dan pengembangan daerah	Capaian fasilitasi bidang penelitian dan pengembangan daerah	86%

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	86%
4.1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	tersedianya pedoman tahapan penelitian dan pengkajian daerah	1 dok

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target
	Kajian Pendataan Penyandang Disabilitas	jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 dok
4.2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	tersedianya pedoman tahapan penelitian dan pengkajian daerah	1 dok
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 dok
4.3.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	tersedianya pedoman tahapan pengembangan dan inovasi daerah	1 dok
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	1 dok

Dari pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, capaian kinerja yang diperoleh sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%
		Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%
		Persentase keterisian data dan informasi	60%	60%	100%
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dok	4 dok	100
	Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen Renja OPD	2 dok	2 dok	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	1 kali	1 kali	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan musrenbang kabupaten	1 kali	1 kali	100

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	jumlah dokumen bahan musrenbang kecamatan	1 dok	1 dok	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten	2 dok	2 dok	100
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	3 dok	3 dok	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3 dok	3 dok	100
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	2 dok	2 dok	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	jumlah dokumen evaluasi pembangunan	2 dok	2 dok	100
2.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	100%	100
		Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100%	100%	100
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya	2 dok	2 dok	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	1 dok	1 dok	100

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud	2 dok	2 dok	100
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan perekonomian dan SDA	3 dok	3 dok	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1 dok	1 dok	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	2 dok	2 dok	100
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2 dok	2 dok	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2 dok	2 dok	100
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83 indeks	86 indeks	105,73
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya pedoman perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 dok	15 dok	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, dan laporan PD yang tersusun sesuai standart	9 dok	9 dok	100

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	6 dok	6 dok	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan keuangan PD	8 dok	8 dok	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD	7 Orang	7 Orang	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	8 dok	8 dok	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya ASN dengan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi	35 orang	37 orang	105,71
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	5 orang	7 orang	140
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	35 orang	35 orang	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur	38 dok	38 dok	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis	7 jenis	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	45 jenis	45 jenis	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	8 jenis	8 jenis	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor	10 jenis	10 jenis	100

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	5 jenis	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 judul	2 judul	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi	30 kali	30 kali	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur	15 dok	15 dok	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	3 jenis	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah PHD dan tenaga administrasi	8 orang	8 orang	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur	30 unit	30 unit	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	30 unit	30 unit	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang dipelihara	10 unit	10 unit	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	1 unit	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 unit	5 unit	100

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	86%	86%	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	tersedianya pedoman tahapan penelitian dan pengkajian daerah	1 dok	1 dok	100
	Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan	jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 dok	1 dok	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	tersedianya pedoman tahapan penelitian dan pengkajian daerah	1 dok	1 dok	100
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 dok	1 dok	100
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	tersedianya pedoman tahapan pengembangan dan inovasi daerah	1 dok	1 dok	100
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	1 dok	1 dok	100

Berdasarkan tabel capaian kinerja fungsi penunjang perencanaan terhadap target RKPd tahun 2022 dan target akhir RPJMD tahun 2018-2023, untuk indikator konsistensi program RPJMD ke dalam RKPd telah tercapai, yaitu 100% program RPJMD sejumlah 151 program masuk ke dalam RKPd. Demikian juga terhadap target akhir RPJMD yaitu sebesar 100% secara umum dapat diperkirakan bahwa target tersebut akan tercapai di akhir periode RPJMD 2018 – 2023.

Terdapat perbedaan antara target kinerja RKPd dengan RPJMD (belum sinkron dan konsisten) serta terdapat kegiatan yang tidak direncanakan akan tetapi dianggarkan dalam mekanisme APBD dan kadang kurang sinkron dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD). Jumlah program dan kegiatan Perubahan RKPd yang terakomodir di APBD sebesar 100 % (220 program dan 525 kegiatan).

Kondisi yang lebih baik ditunjukkan oleh indikator persentase keterisian data/informasi. Dari target pada tahun 2022 sebesar 60%, telah terealisasi sebesar 60% yang artinya tercapai 100%. Dengan melihat realisasi ketercapaian tersebut, maka target 65% pada tahun akhir periode RPJMD sangat optimis dapat tercapai. Maka Bappeda Kabupaten Kudus mempunyai waktu 1 (satu) tahun untuk meningkatkan realisasi keterisian data/informasi sebesar 5% hingga akhir periode RPJMD Tahun 2018-2023.

Selanjutnya untuk indikator cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya; serta cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam juga menunjukkan realisasi capaian yang sesuai target pada tahun 2022 sebesar 100%. Dengan target yang konstan hingga akhir periode RPJMD, maka Bappeda harus tetap fokus untuk menjamin ketercapaian target tersebut hingga 1 (satu) tahun mendatang. Dalam urusan penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan, indikator capaian fasilitasi bidang penelitian dan pengembangan daerah pada tahun 2022 tercapai sebesar 86% yang berarti tingkat capaian 100% dari target kinerja di tahun 2022. Dari kondisi tersebut, perlu adanya perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022 sehingga target kinerja pada tahun akhir periode Renstra dapat tercapai sesuai target yang direncanakan.

Secara garis besar, capaian indikator kinerja program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tergolong kategori "Sangat Tinggi" berdasarkan skala pengukuran kinerja (Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 86 Tahun 2017). Faktor pendorong keberhasilan kinerja yaitu adanya percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja, dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta manajemen sumber daya. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan kinerja di Bappeda yaitu ketersediaan data informasi belum optimal pada saat data tersebut dibutuhkan karena pengolahan data tergantung pada support instansi lain. Tindak lanjut yang diperlukan dalam capaian indikator kinerja pada tahun berikutnya antara lain: perlu dilaksanakan upaya untuk mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah serta mempertahankan kinerja yang telah mencapai target dan tetap meningkatkan berbagai inovasi untuk pembangunan Kabupaten Kudus.

Tabel 3.4

Alternatif Solusi pada Permasalahan Bappeda Tahun 2022

No.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83	Indeks	88,38	Indeks		
	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya pedoman perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15	Dok	15	Dok	➤ Belum sesuai dokumen perencanaan dengan ketentuan yang berlaku	➤ Penyesuaian dokumen perencanaan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan keuangan PD	8	Dok	8	Dok	tidak ada	tidak ada
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya ASN dengan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi	35	Org	35	Org	tidak ada	tidak ada
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur	38	Dok	38	Dok	➤ Beberapa item anggaran hanya terserap sesuai kebutuhan/momen saja.	➤ Penyesuaian anggaran mengacu pada realisasi tahun ini saja

No.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur	15	Dok	15	Dok	tidak ada	tidak ada
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur	30	Unit	30	Unit	➤ Sebagian jenis BMD membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi/high cost	➤ Pengadaan baru peralatan kantor
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	Persen	100	Persen		
		Persentase keterisian data/informasi	60	Persen	60	Persen		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	4	Dok	4	Dok	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketidakhadiran kepala atau Pejabat OPD yang berwenang atas rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam forum menyebabkan koordinasi kurang optimal ➤ Perangkat daerah masih membutuhkan pendampingan dalam pencapaian kinerja ➤ Pengusulan kegiatan belum 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan koordinasi dengan OPD ➤ Terus memonitor perkembangan usulan dan melakukan pendampingan atas penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah ➤ Mengarahkan OPD untuk merencanakan program dan kegiatan agar lebih tepat

No.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI
							<p>sepenuhnya memperhatikan target pembangunan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya keterlibatan kepala OPD secara langsung menyebabkan usulan kurang optimal ➤ belum semua masyarakat mampu mengakses kegiatan musrenbang ➤ sosialisasi pemberian usulan dari masyarakat masih kurang ➤ Pengusulan kegiatan kecamatan dan desa belum sepenuhnya memperhatikan target dan prioritas pembangunan daerah ➤ Ketidaktepatwaktu dari Kecamatan dalam menginput usulan ke sistem perencanaan ➤ belum semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat karena wilayahnya tidak tercantum dalam RKPD 	<p>sasaran dengan memberikan gambaran permasalahan yang nyata dan mendukung tercapainya target – target pembangunan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan koordinasi dengan OPD ➤ Mengkombinasikan antara pelaksanaan musrenbang RKPD secara tatap muka dengan pelaksanaan musrenbang RKPD secara online dengan memanfaatkan media sosial ➤ Sosialisasi yang lebih masif melalui media radio, media cetak ➤ Mengarahkan Kecamatan dan Desa untuk mengusulkan program dan kegiatan yang benar-benar mendesak, merata, tepat sasaran dan sesuai prioritas daerah, dengan memberikan gambaran permasalahan yang nyata dan mendukung tercapainya target – target pembangunan daerah. ➤ Meningkatkan koordinasi dengan Kecamatan dan terus memonitor perkembangan usulan ➤ Mengarahkan OPD untuk merencanakan program dan kegiatan yang benar-benar mendesak, merata dan sesuai prioritas daerah

No.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI
							<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perubahan kebijakan dan peraturan oleh Pemerintah Pusat ➤ Ketidaktepatwaktu OPD dan pendamping komisi dalam menginput usulan ke sistem perencanaan ➤ Dengan kegiatan yang normatif dan berulang setiap tahun, masyarakat cenderung jenuh dan apatis karena usulannya tidak terealisasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meng-<i>upgrade</i> dan maintenance sistem informasi perencanaan mengikuti perubahan regulasi dan memperbaiki segera sistem jika terjadi masalah ➤ Meningkatkan koordinasi dengan OPD dan terus memonitor perkembangan usulan ➤ Memberikan informasi yang cukup dan feedback atas usulan masyarakat secara komunikatif
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	3	Dok	3	Dok	➤ belum terupdatenya data tepat waktu	➤ meningkatkan koordinasi antar instansi
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	2	Dok	2	Dok	➤ kurang sinkronnya antar data	➤ satu data dalam satu sistem

No.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100	Persen	100	Persen		
		cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam						
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya	2	Dok	2	Dok	➤ kurang konsistensinya penyusunan perencanaan; kurangnya respon PD dalam tindak lanjut koordinasi	➤ meningkatkan koordinasi dan konsultasi; survey lapangan (sarpras pendidikan & kesehatan)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan perekonomian dan SDA	3	Dok	3	Dok	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya monitoring dan fasilitasi pembinaan ke Fedep ➤ Kurangnya arahan dari Provinsi kepada daerah tentang arah dan kebijakan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah ➤ Belum optimalnya penanganan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk menyerap aspirasi ➤ Koordinasi dengan pihak Provinsi dan daerah lain. ➤ Koordinasi dengan dinas terkait

No.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI
							<ul style="list-style-type: none"> perumahan dan Kawasan permukiman dikarenakan belum berfungsinya forum PKP ➤ Surat Keputusan Kumuh masih dalam tahap revisi ➤ Belum optimalnya pengelolaan sampah dikarenakan keterbatasan lahan TPA ➤ Masih minimnya penyerapan kegiatan pelatihan dan bantuan usaha pada buruh tani (dana cukai) disebabkan adanya peraturan PMK yang baru 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi dan pembinaan ➤ Bantuan modal dan pelatihan pada buruh tani
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2	Dok	2	Dok	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kurangnya respon perangkat daerah dalam tindak lanjut koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ lebih mengintensifkan koordinasi dan pendampingan perangkat daerah
3.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	86	Persen	86	Persen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasan SDM pengampu penelitian. ➤ Keterbatasan data sektoral yang diampu Perangkat Daerah terkait. 	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	tersedianya pedoman tahapan penelitian dan pengkajian daerah	1	Dok	1	Dok	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasan SDM pengampu penelitian. ➤ Keterbatasan data sektoral yang diampu Perangkat Daerah terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤

No.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	tersedianya pedoman tahapan penelitian dan pengkajian daerah	1	Dok	1	Dok	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasan SDM pengampu penelitian. ➤ Keterbatasan data sektoral yang diampu Perangkat Daerah terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan ASN Bidang Litbang yang ada dengan bekerjasama Perguruan Tinggi di Kudus dalam hal penyusunan penelitian dan kajian (<i>policy brief</i>). ➤ Kolaborasi dan sinergitas dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal serta Perguruan Tinggi dalam penyusunan data IDSD.
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	tersedianya pedoman tahapan pengembangan dan inovasi daerah	1	Dok	1	Dok	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasan SDM pengampu inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengintegrasian sistem inovasi antara IGA (milik Kemendagri) dengan PINDAH (milik PemProv. Jateng) dan E-KRENOVA (milik Bidang Litbang Bappeda Kab. Kudus). ➤ Koordinasi aktif dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Bidang Risbang dan Bidang Inotek) dan BPP Kemendagri.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2022 didukung dengan anggaran APBD Kabupaten Kudus sebesar Rp. 11.539.617.531,00,- yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 11.081.644.731,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 457.972.800,- yang seluruhnya merupakan anggaran murni APBD Kabupaten Kudus.

Selanjutnya di dalam perubahan APBD Tahun 2022, terjadi perubahan anggaran dengan total anggaran naik dari anggaran sebelumnya Rp. 8.992.625.000,- yang terbagi menjadi Belanja Operasi sebesar Rp.8.697.501.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 295.124.000,-. Realisasi Anggaran Bappeda pada tahun 2022 sebesar Rp.10.684.978.003,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.673.071.600,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.011.906.403,-. Adanya perubahan anggaran tidak menyurutkan komitmen seluruh pegawai dan unit kerja di Bappeda untuk tetap memenuhi target kinerja yang telah direncanakan.

Rincian penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

3.2.1 Realisasi Anggaran Sasaran Program 1.1

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.832.266.820,00	2.317.934.206,00	81,84
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.964.140.145,00	1.964.140.145,00	77,58
Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	250.382.000,00	208.262.500,00	83,18
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	138.930.610,00	43.613.000,00	31,39
Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	70.987.035,00	70.055.740,00	98,69
Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	2.250.000,00	2.220.000,00	98,67
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.501.590.500,00	1.199.680.000,00	79,89
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	574.960.425,00	570.484.500,00	99,22
Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	574.960.425,00	570.484.500,00	99,22

Program / Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	293.166.250,00	223.618.466,00	76,28
	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	293.166.250,00	223.618.466,00	76,28

3.2.2 Realisasi Anggaran Sasaran Program 1.2

Program / Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	322.440.000,00	298.981.399,00	92,72
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	199.440.000,00	191.224.263,00	95,88
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34.000.000,00	30.695.263,00	90,28
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	165.440.000,00	160.529.000,00	97,63
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	74.000.000,00	65.711.109,00	88,80
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.000.000,00	39.248.500,00	93,45
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.000.000,00	26.462.609,00	82,70
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	49.000.000,00	42.046.027,00	85,81
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.000.000,00	42.046.027,00	85,81

3.2.3 Realisasi Anggaran Sasaran Program 2.1

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.049.240.711,00	7.752.813.155,00	96,72
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.550.000,00	9.648.400,00	71,21
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00	5.300.400,00	75,72
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.550.000,00	4.348.000,00	66,38
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.821.009.911,00	5.729.058.100,00	98,42
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.000.000,00	48.039.800,00	68,93
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	1.970.000,00	39,40
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	714.550.000,00	671.991.000,00	94,04
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	20.850.000,00	69,50
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	684.550.000,00	651.141.000,00	95,12
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	709.446.800,00	607.913.871,00	85,69
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	6.446.000,00	85,95
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	364.685.800,00	350.890.000,00	96,22
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.000.000,00	7.009.000,00	41,23
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.300.000,00	43.154.000,00	95,26

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	12.774.600,00	91,25
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000,00	6.840.000,00	81,43
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.561.000,00	180.800.271,00	71,59
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.800.000,00	310.051.408,00	92,33
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.400.000,00	50.143.902,00	71,23
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.400.000,00	259.907.506,00	97,93
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.884.000,00	424.150.376,00	81,26
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.145.000,00	264.094.376,00	93,60
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	4.700.000,00	39,17
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	135.920.000,00	131.680.000,00	96,88
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.819.000,00	23.676.000,00	95,39

3.2.4 Realisasi Anggaran Sasaran Program 3.1

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	335.670.000,00	321.293.673,00	95,72
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	97.770.000,00	97.088.000,00	99,30

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	97.770.000,00	97.088.000,00	99,30
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	82.000.000,00	80.866.465,00	98,62
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	82.000.000,00	80.866.465,00	98,62
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	155.900.000,00	143.339.208,00	91,94
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	155.900.000,00	143.339.208,00	91,94

Dilihat dari laporan realisasi penyerapan anggaran APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, realisasi Belanja Bappeda Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

Total Belanja dengan anggaran Rp. 11.539.617.531,00,- terealisasi sebesar Rp. 10.684.978.003,00,- (92,59 %) dengan perincian :

- Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp. 5.746.009.911,00 dengan realisasi Rp. 5.673.071.600,- (98,73 %)
- Belanja Langsung dengan anggaran Rp. 5.793.607.620,00 dengan realisasi Rp. 5.011.906.403,- (86,51 %)

3.4 Efisiensi Anggaran

Dalam hal penyerapan anggaran, Bappeda Kabupaten Kudus dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Walaupun terjadi penambahan alokasi anggaran, masih terdapat efisiensi Belanja secara keseluruhan sebesar Rp. 854.639.528,00,- atau sebesar 7,4% dari keseluruhan anggaran belanja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2022 sebesar Rp. 11.539.617.531,00,-. Efisiensi Anggaran yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Kudus di Tahun Anggaran 2022 dirangkum dalam tabel 3.5 berikut:

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
Belanja Tidak Langsung	5.746.009.911,00	5.673.071.600,00	98,73
Belanja Langsung	5.793.607.620,00	5.011.906.403,00	86,51
Belanja	11.539.617.531,00	10.684.978.003,00	92,59

Selanjutnya dalam Tabel 3.5 dilakukan analisis akuntabilitas kinerja dan anggaran, terlihat bahwa Bappeda Kabupaten Kudus secara umum dapat melakukan efisiensi dengan sumber daya anggaran yang tersedia, tapi tetap dapat mencapai target kinerja yang telah direncanakan.

Efisiensi paling tinggi sebesar 60,83% pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kegiatan administrasi umum perangkat daerah. Hal tersebut disebabkan oleh penyerapan anggaran hanya didasarkan pada peralatan dan mesin yang membutuhkan perbaikan sehingga efisiensi anggaran dapat dilakukan. Selain itu, efisiensi cukup tinggi juga terjadi pada sub kegiatan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Efisiensi tersebut terjadi karena adanya ketentuan baru untuk pelaksanaan rapat bahwa penyerapan konsumsi dapat dilakukan jika peserta rapat tidak hanya dari intern OPD.

Efisiensi paling rendah sebesar 0,70 % yaitu pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dan Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial.

Tabel 3.5

Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Tahun 2022

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus

(* dalam ribu rupiah)

Sasaran Strategis	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Efisiensi	Unit Kerja Penanggung Jawab	Analisis Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4		5		6		7	8	9
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83,50 Indeks	8.049.241	88,38	7.746.769	105,84	96,24	3,76	Sekretaris Bappeda	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.550		9.648		71,21	28,79	Kasubag PEP	ATK
		tersedianya pedoman perencanaan dan evaluasi kinerja	15,00 dok		15,00		100,00				

		perangkat daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.000		5.300		75,72	24,38		ATK
		jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	9,00 dok		9,00		100,00				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.550		4.348		66,38	33,62		ATK
		jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	6,00 dok		6,00		100,00				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.821.010		5.723.081		98,32	1,68	Kasubag Keuangan	
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	8,00 dok		8,00		100,00				

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.746.010		5.673.072		98,73	1,27		Gaji dan TPP
		jumlah ASN	35,00 Orang		35,00		100,00				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			70.000		48.040		68,63	31,37		
		jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD	7,00 Orang		7,00		100,00				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.000		1.970		39,40	60,60		ATK
		jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	8,00 dok		8,00		100,00				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			714.550		671.991		94,04	5,96	Kasubag Umpeg	
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	5,00 orang		5,00		100,00				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			30.000		20.850		69,5	30,5		ATK, Perjalanan

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi										Dinas Biasa, Biaya Kursus Singkat (transportasi)
		jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	3,00 orang		3,00		100,00				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			684.550		651.141		95,12	4,88		ATK, Perjalanan Dinas Biasa
		jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	35,00 orang		35,00		100,00				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			709.447		607.914		85,69	14,31	Kasubag Umpeg	ATK
		tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur	38,00 dok		38,00		100,00				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.500		6.446		85,95	14,05		Komponen Listrik

		jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,00 jenis		7,00		100,00				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			364.686		350.890		96,22	3,78		ATK
		jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	45,00 jenis		45,00		100,00				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			17.000		7.009		41,23	58,77		Pembelian Karangan Bunga
		jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	8,00 jenis		8,00		100,00				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			45.300		43.154		95,26	4,74		Bahan Nатура
		jumlah bahan logistik kantor	10,00 jenis		10,00		100,00				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.000		12.775		91,25	8,75		ATK
		jumlah barang cetakan dan	5,00 jenis		5,00		100,00				

		penggandaan									
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.400		6.840		81,43	18,57		Selisih Tagihan Koran
		jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,00 judul		2,00		100,00				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			252.561		180.800		71,59	28,41		Perjalanan Dinas Biasa
		jumlah koordinasi dan konsultasi	30,00 kali		30,00		100,00				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			335.800		309.984		92,31	7,69	Kasubag Umpeg	
		Jumlah PHD dan tenaga administrasi	15,00 dok		15,00		100,00				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air			70.400		50.144		71,23	28,77		Selisih tagihan listrik dan internet

	dan Listrik										
		jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3,00 jenis		3,00		100,00				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			265.400		259.840		97,9	2,1		Selisih sisa honor phd dan tenaga administrasi
		jumlah PHD dan tenaga administrasi	8,00 orang		8,00		100,00				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			454.884		424.150		93,24	6,76	Kasubag Umpeg	
		Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara	30,00 dok		30,00		100,00				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			282.145		264.094		93,6	6,4		Selisih biaya pemeliharaan mobil dan motor

		jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	5,00 mobil		5,00		100,00				
		Jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	25 motor		25		100				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.000		4.700		39,17	60,83		Service Printer atau Komputer
		jumlah peralatan kerja yang dipelihara	10,00 unit		10,00		100,00				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			135.920		131.680		96,88	3,12		ATK
		jumlah gedung kantor yang terpelihara	1,00 unit		1,00		100,00				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			24.819		23.676		95,39	4,61		ATK
		jumlah peralatan gedung kantor	5,00 unit		5,00		100,00				

		yang terpelihara									
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			2.832.267		2.317.934		81,84	18,16	Kabid PEP	
		Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100,00 persen		100,00		100,00				
		Persentase keterisian data data perencanaan pembangunan	60,00 persen		60,00		100,00				
		Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100 persen		100		100				
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1.964.140		1.523.831		77,58	22,42	Kasubbid Perencanaan Pembangunan	ATK, Perjalanan Dinas Biasa
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4,00 dok		4,00		100,00				

	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			250.382		208.263		83,18	16,82		
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	2,00 dok		2,00		100,00				
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			66.185		63.335		95,69	4,31		ATK, Mamin Rapat
		jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	1,00 kali		1,00		100,00				
		Jumlah pelaksanaan forum konsultasi publik	1,00 kali		1,00		100,00				
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			70.987		70.056		98,69	1,31		ATK, Kertas Cover, Mamin Rapat
		jumlah pelaksanaan	1,00 kali		1,00		100,00				

		musrenbang kabupaten									
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			2.250		2.220		98,67	1,33		
		jumlah dokumen bahan musrenbang kecamatan	1,00 dok		1,00		100,00				
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1.501.591		1.199.680		79,89	20,11		ATK, Kertas Cover, Mamin Rapat
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten	2,00 dok		2,00		100,00				
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan			574.960		570.485		99,22	0,78	Kasubbid data dan informasi pembangunan	ATK, Mamin Rapat

	Pembangunan Daerah										
		Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3,00 dok		3,00		100,00				
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			574.960		570.485		99,22	0,78		ATK, Mamin Rapat
		dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan	3,00 dok		3,00		100,00				
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			293.166		223.618		76,28	23,72	Kasubbid Evaluasi Pembangunan	ATK, Jasa Kesenian, Perjalanan Dinas Dalam Kota
		Jumlah dokumen evaluasi pembangunan	2,00 dok		2,00		100,00				
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di			293.166		223.618		76,28	23,72		ATK, Jasa Kesenian, Perjalanan Dinas Dalam Kota

	Kabupaten/Kota										
		jumlah dokumen evaluasi pembangunan	2,00 dok		2,00		100,00				
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			322.440		298.981		92,72	7,28	Kabid Pemsosbud dan Kabid Ek Praswil SDA	
		Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100,00 persen		100,00		100,00				
		cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100,00 persen		100,00		100,00				
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan			199.440		191.224		95,88	4,12	Kabid PemSosbud	

	Pembangunan Manusia										
		Jumlah doumen perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya	2,00 dok		2,00		100,00				
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			34.000		30.695		90,28	9,72	Kasubbid Pemerintahan	ATK, Mamin Rapat
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	1,00 dok		1,00		100,00				
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,			165.440		160.529		97,03	2,97	Kasubbid Sosbud	ATK, Mamin Rapat

	RPJMD dan RKPD)										
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud	2,00 dok		2,00		100,00				
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			74.000		65.711		88,80	11,20	Kabid Ek Praswil SDA	ATK, Mamin Rapat
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perekonomian dan SDA	3,00 dok		3,00		100,00				
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			42.000		39.249		93,45	6,55	Kasubbid Ekonomi	ATK, Mamin Rapat
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1,00 dok		1,00		100,00				

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			32.000		26.463		82,70	17,30	Kasubbid SDA	ATK, Mamin Rapat
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	2,00 dok		2,00		100,00				
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			49.000		42.046		85,81	14,19	Kasubbid Praswil	ATK, Mamin Rapat
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2,00 dok		2,00		100,00				
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			49.000		42.046		85,81	14,19		ATK, Mamin Rapat

	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
		jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah	2,00 dok		2,00		100,00				
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			335.670		321.294		95,72	4,28	Kabid Litbang	
		capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	86,00 persen		86,00 persen		100,00				
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			97.770		97.088		99,30	0,70		
		Tersedianya dokumen penelitian dan pengkajian	1,00 dok		1,00		100,00				
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial			97.770		97.088		99,30	0,70		
		Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1,00 dok		1,00		100,00				

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			82.000		80.866		98,62	1,38	Kasubbid Penelitian	Mamin Rapat
		Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1,00 dok		1,00		100,00				
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			82.000		80.866		98,62	1,38		Mamin Rapat
		jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1,00 dok		1,00		100,00				
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			155.900		143.339		91,94	8,06	Kasubbid Inovasi	Mamin Rapat
		Jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	1,00 dok		1,00		100,00				
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			155.900		143.339		91,94	8,06		Mamin Rapat
		jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	1,00 dok		1,00		100,00				

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. 3 (tiga) indikator tujuan dan sasaran kinerja Bappeda Kabupaten Kudus mempunyai persentase capaian dengan kategori "Sangat Tinggi" berdasarkan skala pengukuran Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017).
2. Indikator kinerja pertama mempunyai persentase capaian yang fluktuatif antara tahun 2019 s/d 2022. Pada tahun 2020, persentase capaian mengalami penurunan sebesar 3,73% dibandingkan tahun 2019 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 12,92%, sedangkan pada tahun 2022 secara capaian dari tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,84%. Akan tetapi penurunan persentase capaian ini disebabkan karena meningkatnya target pada tahun 2022 yaitu sebesar 100% dibanding target tahun 2021 sebesar 95%. Sehingga secara keseluruhan tetap menunjukkan peningkatan capaian kinerja organisasi.
3. Indikator kinerja yang kedua, dimana persentase capaian fluktuatif antara tahun 2019 s/d 2022, walaupun realisasinya mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, persentase capaian mengalami penurunan sebesar 1,22% dan realisasi mengalami kenaikan sebesar 1,27 dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021, baik realisasi dan persentase capaian mengalami kenaikan sebesar 4,66 dan 2,66 % dibandingkan tahun 2020. Sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan realisasi sebesar 1,15% dari realisasi tahun 2021 akan tetapi mengalami penurunan capaian sebesar 6,66% dibanding tahun 2021 karena adanya peningkatan target pada tahun 2022.
4. Pada indikator ketiga, persentase capaian relatif stabil antara tahun 2019 s/d 2022 yaitu sebesar 100%.
5. Faktor pendorong keberhasilan kinerja Bappeda tahun 2022 yaitu adanya percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja, dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, manajemen sumber daya, serta koordinasi lintas Perangkat Daerah. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan kinerja di Bappeda yaitu belum optimalnya ketersediaan data informasi sesuai kebutuhan. Hal ini karena sebagian data yang dibutuhkan bersumber atau disupport dari instansi lain.

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Kudus di masa yang akan datang adalah :

1. Meningkatkan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan mengintensifkan fasilitasi terhadap seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kudus;
2. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholder beserta seluruh perangkat daerah untuk mencapai target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang dimiliki Bappeda Kabupaten Kudus untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

4. Kolaborasi dan sinergitas dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta Perguruan Tinggi dalam penyusunan data IDSD;
5. Pengintegrasian sistem inovasi antara IGA (milik Kemendagri) dengan PINDAH (milik PemProv. Jateng) dan E-KRENOVA (milik Bidang Litbang Bappeda Kab. Kudus);
6. Koordinasi aktif dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Bidang Risbang dan Bidang Inotek) serta BPP Kemendagri terkait peningkatan inovasi daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus Tahun 2022, untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*).

Kami berharap, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi agar Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kudus yang telah disusun sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023. Disamping itu laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan atau peningkatan kinerja dan proses perencanaan yang akan datang.

Kudus, | Februari 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus



Drs. REVLI SIANTO SUBEKTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660321 198603 1 006

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313
Telp (0291) 430080 Fax (0291) 445324
email : bappeda@kuduskab.go.id Website : bappeda.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

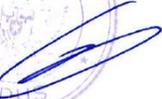
Nama : Drs. REVLISANTO SUBEKTI
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH, KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH
Jabatan : BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Kudus, 21 Desember 2022
Pihak Pertama,

Drs. REVLISANTO SUBEKTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660321 198603 1 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase Capaian IKU Bupati	100,00 %
2	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	86,00 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81,00 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.049.240.711	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.832.266.820	
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	322.440.000	
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	335.670.000	
TOTAL		11.539.617.531	



Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Kudus, 21 Desember 2022
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,,



Drs. REVLIANTO SUBEKTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660321 198603 1 006

PRESTASI / PENGHARGAAN



"Kabupaten Sangat Inovatif"

Innovative Government Award Tahun 2020



Penghargaan Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020

PRESTASI / PENGHARGAAN



Perangkat Daerah Kategori PMPRB Terbaik KETIGA Tahun 2022



Penghargaan Terbaik Peringkat I Dalam Penyampaian dan Pengisian Metadata Statistik Di Kabupaten Kudus Tahun 2022

PRESTASI / PENGHARGAAN



Penghargaan Perangkat Daerah Berkinerja Terbaik Tahun 2020



Perangkat Daerah Kategori SAKIP Terbaik KEDUA Tahun 2020

PRESTASI / PENGHARGAAN



Perangkat Daerah Kategori SAKIP Terbaik KETIGA Tahun 2019

**RENCANA KERJA TAHUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2022**

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83,50 Indeks	SEKRETARIS
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya pedoman perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15,00 dok	SEKRETARIS
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	9,00 dok	KASUBBAG PEP
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	6,00 dok	KASUBBAG PEP
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan keuangan PD	8,00 dok	SEKRETARIS
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN	35,00 Orang	KASUBBAG. KEUANGAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD	7,00 Orang	KASUBBAG. KEUANGAN
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	8,00 dok	KASUBBAG. KEUANGAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya ASN dengan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi	35,00 orang	SEKRETARIS
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	5,00 orang	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	35,00 orang	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur	38,00 dok	SEKRETARIS
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,00 jenis	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	45,00 jenis	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	8,00 jenis	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor	10,00 jenis	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	5,00 jenis	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	2,00 judul	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi	30,00 kali	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur	15,00 dok	SEKRETARIS
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3,00 jenis	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah PHD dan tenaga administrasi	8,00 orang	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur	15,00 dok	SEKRETARIS

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	30,00 unit	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang dipelihara	10,00 unit	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terpelihara	1,00 unit	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5,00 unit	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100,00 persen	KABID. PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	4,00 dok	KABID. PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen Renja OPD	2,00 dok	SUBKOR. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	1,00 kali	SUBKOR. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan musrenbang kabupaten	1,00 kali	SUBKOR. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	jumlah dokumen bahan musrenbang kecamatan	1,00 dok	SUBKOR. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten	2,00 dok	SUBKOR. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	3,00 dok	KABID. PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3,00 dok	SUBKOR. DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	2,00 dok	KABID. PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	jumlah dokumen evaluasi pembangunan	2,00 dok	SUBKOR. EVALUASI PEMBANGUNAN
		Persentase keterisian data dan informasi	60,00 %	KABID. PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100,00 persen	KABID. PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya	2,00 dok	KABID. PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	1,00 dok	SUBKOR. PEMERINTAHAN
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud	1,00 dok	SUBKOR. SOSIAL BUDAYA

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	RKPD)			
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan perekonomian dan SDA	3,00 dok	KABID PRASARANA WILAYAH, EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1,00 dok	SUBKOR. EKONOMI
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	2,00 dok	SUBKOR. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2,00 dok	KABID PRASARANA WILAYAH, EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2,00 dok	SUBKOR. PRASARANA WILAYAH
		cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100,00 persen	KABID PRASARANA WILAYAH, EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	86,00 persen	KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	tersedianya pedoman tahapan penelitian dan pengkajian daerah	1,00 dok	KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan	jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1,00 dok	SUBKOR. PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	tersedianya pedoman tahapan penelitian dan pengkajian daerah	1,00 dok	KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1,00 dok	SUBKOR. PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	tersedianya pedoman tahapan pengembangan dan inovasi daerah	1,00 dok	KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	1,00 dok	SUBKOR. PENGEMBANGAN DAN INOVASI